

ABSTRAK

DESKRIPSI PEMBUNGAN SAMPAH BERDASARKAN PERDA KOTA KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGARAAN PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

(Studi Kasus di Kecamatan Kelapa Lima)

Maria Naftalia Putri Taneofeto (21310053)

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Mengapa Perda Pembuangan Sampah telah ditetapkan dan tempat pembuangan sampah telah disediakan tetapi masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya?. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui alasan Perda Pembuangan Sampah telah ditetapkan dan tempat pembuangan sampah telah disediakan tetapi masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya.

Jenis Penelitian ini adalah Empiris. Penelitian empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga data yang didapat adalah data yang menggambarkan tentang penerapan suatu hukum terhadap fakta yang ditemui di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang ada. Responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 19 orang terdiri atas 1 pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang (DLHK), 5 Ketua RT/RW dan 13 Mahasiswa/I Penghuni Kos. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif yaitu melibatkan pengumpulan dan analisis sumber bahan yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder. Data yang diperoleh akan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa Perda tentang Pembuangan Sampah telah ditetapkan dan tempat pembuangan sampah telah disediakan tetapi masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sanksi yang tidak tegas dari pemerintah, ketidaktahuan masyarakat terhadap Perda dan perilaku tidak tertib dalam penggunaan TPS

Kata kunci: Pembuangan Sampah, Perda Kota Kupang, Kecamatan Kelapa Lima

ABSTRACT

DESCRIPTION OF WASTE DISPOSAL BASED ON KUPANG CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF 2011 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF HOUSEHOLD WASTE AND WASTE SIMILAR TO HOUSEHOLD WASTE REDUCTION

(Case Study in Kelapa Lima District)

Maria Naftalia Putri Taneofeto (21310053)

The issue addressed in this research is: Why do people continue to dispose of waste improperly despite the enactment of the Waste Disposal Regional Regulation and the provision of waste disposal facilities? This study aims to understand why the regulation has been established and facilities have been provided, yet the community still fails to dispose of waste in designated areas.

This research employs an empirical legal approach, which seeks to observe the law as it functions in reality examining how legal norms operate within society. The research is descriptive in nature, meaning that the data collected describe the implementation of legal regulations in relation to the facts found in the field. The study involved 19 respondents, including one staff member from the Kupang City Environmental and Sanitation Agency (DLHK), five neighborhood leaders (RT/RW), and thirteen boarding house student residents. The data analysis technique used is qualitative descriptive analysis, which involves collecting and analyzing both primary and secondary sources. The data obtained were analyzed systematically to produce conclusions relevant to the issues discussed.

Based on the results of the research conducted by the author, it shows that the Regional Regulation (Perda) on Waste Disposal has been enacted and waste disposal sites have been provided, yet the community still disposes of waste improperly. This is caused by the lack of legal awareness among the public, the government's weak enforcement of sanctions, the public's lack of knowledge about the regulation, and undisciplined behavior in the use of waste disposal sites (TPS)

Keywords: Waste Disposal, Kupang City Regional Regulation, Kelapa Lima District